

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang berfikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari Sang Khaliq untuk beribadah. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu watta'alla dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya. Untuk mengolah akal pikirannya diperlukan suatu pola pendidikan dengan proses pembelajaran.

Pengertian pendidikan secara umum, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum (Pidarta, 2007: 2). Pendidikan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak manusia ada di muka bumi.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsadan Negara (Anonim, 2006: 2).

Departemen Pendidikan Nasional melalui empat strategi pembangunan bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pemerataan kesempatan belajar, relevansi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan

efisien serta efektivitas pendidikan. Tuntutan globalisasi cenderung adanya sistem mutu yang berskala internasional bukan lagi lokal atau nasional (Permadi, 2007: 13).

Lembaga Pendidikan adalah sebuah aktivitas besar yang didalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah: Staf Tata Usaha dan Administrasi, Staf Teknis Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dengan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelajaran yang harus memadai. Hubungan keempat komponen harus sinergis karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari "*simbiosis mutualisme*".

Proses pendidikan di Indonesia dikenal dengan adanya pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Menurut DR. Philip H. Coombs pendidikan dibagi menjadi 3 macam:

1. Pendidikan in formal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati.
2. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertindak, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.

3. Pendidikan non formal ialah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat (Joesoef, 2008: 16).

Pendidikan Formal adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan cara dan dalam lingkungan sekolah. Sedangkan pendidikan Non Formal adalah pendidikan di luar sekolah, namun tetap berada di bawah naungan Departemen Pendidikan.

Menurut Dimiyati (2009: 78) kegiatan belajar ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, perpustakaan, kebun binatang, sawah, sungai, atau hutan. Artinya belajar dapat dilakukan di sembarang tempat, kondisi dan waktu. Dalam pembelajarannya pendidikan nonformal menggunakan metode yang berbasis keterampilan yang langsung bermanfaat di masyarakat.

Menurut Rohani (2004: 1) pengajaran merupakan aktivitas (proses) yang sistematis dan sistemik terdiri dari banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer, dan berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik. Dalam pembelajaran, diharapkan bukan sekedar penyampaian pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik saja, tetapi ada dua arah antara pendidik dengan

peserta didik, diharapkan peserta didik berperan aktif dalam pembelajarannya. Peran pendidikan nonformal dalam keikutsertaan mengentaskan kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan telah memperoleh perhatian dari para pengambil kebijakan pembangunan pendidikan di seluruh dunia khususnya di Indonesia.

Indonesia mempunyai komitmen untuk menyediakan layanan pendidikan bagi orang dewasa, dalam bentuk pendidikan berkelanjutan. Makna pendidikan berkelanjutan dirumuskan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kerja. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima Pendidikan Nonformal disebutkan:

1. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional.
3. Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan.
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri

Berangkat dari tujuan, tugas dan fungsi pendidikan luar sekolah tersebut di atas, maka perlu diselenggarakan program yang dapat membantu masyarakat untuk keluar dari keterbelakangan, ketergantungan menuju kepada suatu titik perubahan yang memberdayakan masyarakat. Dalam paradigma pemberdayaan, pendekatannya lebih bersifat *partisipatif* dengan memperhatikan keberadaan masyarakat dan potensi lokal yang realistis yang diutamakan.

Masyarakat perlu dimotivasi, diarahkan agar dapat memiliki kesadaran untuk belajar, untuk berubah dan mampu melihat potensi diri serta peluang yang ada disekitarnya. Kemudian dikelola dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Salah satu lembaga pendidikan non formal untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui PKBM.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (komunitas tertentu) sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut (Anonim, 2003: 5).

Dalam rangka merealisasikan tujuan, tugas dan fungsi Pendidikan Luar Sekolah, maka diperlukan suatu wadah atau lembaga sebagai tempat belajar, menggali, memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi masyarakat yang lebih cerdas, kreatif dan mandiri. Menurut Kamil (2009: 81), PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, beraneka ragam dan terbuka bagi semua kelompok usia, sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sehingga peran-peran masyarakat dalam PKBM tidak hanya sekedar sebagai sasaran, akan tetapi sebagai sumber belajar, yang akhirnya tumbuh rasa memiliki, rasa percaya diri akan program-program yang dikembangkannya.

Agar PKBM tetap eksis sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya dibutuhkan pengelolaan yang baik. Menurut Kamil (2009: 113) “..... mampu mengelola sumber-sumber yang dibutuhkan program apabila didukung oleh kemampuan menyusun strategi yang ampuh dalam menjalankan fungsi manajerial yang dimiliki”.

Untuk mencapai tujuan PKBM akan mengelola empat bidang pokok:

1. Jenis Program

Program yang dapat diselenggarakan di PKBM adalah program pembelajaran/pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

## 2. Persiapan dan Pelaksanaan Program

Menyiapkan program, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merekrut warga belajar dan tutor, menyusun program pembelajaran/pelatihan, membentuk kelompok belajar, menyiapkan alat dan bahan ajar, menyusun jadwal dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran dengan tutor atau pihak-pihak terkait serta memantau proses kegiatan pembelajaran/pelatihan.

## 3. Sumber Dana

Sumber-sumber pendanaan yang diharapkan mendukung penyelenggaraan program-program pembelajaran/pelatihan antara lain: swadana, pemerintah daerah/pusat, lembaga, perusahaan dan lembaga keuangan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## 4. Administrasi

Administrasi umum, administrasi pembelajaran/pelatihan, buku modul, papan nama, program kerja dan bagan struktur organisasi PKBM. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda (Anonim, 2003: 9).

Bagaimana cara mempertahankan PKBM yang sudah ada itu tetap eksis karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh PKBM, apalagi yang ada di daerah terpencil. Oleh karena itulah perlu dicarikan solusi yang bisa menjawab persoalan ini, agar PKBM yang sudah berdiri sekarang jangan sampai 'gulung tikar'. Solusinya adalah dengan cara mengadopsi manajemen yang bagus sesuai dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen pendidikan adalah manajemen pengajaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, sarana prasarana, manajemen humas, kesiswaan dan layanan khusus (Mantja, 2005: 35). Sebagai usaha yang bisa membawa suatu kemajuan bagi PKBM yang sudah ada, agar bisa diimplementasikan dengan program yang bisa memberikan *life skill* terhadap warga belajar. Namun dalam menciptakan manajemen yang bagus dan bisa membuat kemajuan itu tentunya bukan pekerjaan mudah, tapi bukan berarti kita pesimistis karena itu bukan suatu yang mustahil. Dengan adanya keseriusan dalam mengelola lembaga PKBM dan mampu mengaplikasikan manajemen yang baik, niscaya lembaga pendidikan non formal yang merupakan lembaga pendidikan alternatif ini bisa tetap eksis dan bisa terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang benar-benar gratis.

Untuk itu salah satu unsur penting yang dimiliki oleh PKBM agar tetap eksis dan bisa terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang benar-benar gratis, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur.



Pemerintah sebagai agen pembangunan diharapkan berperan dalam membantu meringankan biaya pendidikan, mengingat pendidikan membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Bantuan pemerintah sangat diperlukan menjamin proses pendidikan. “Tanpa bantuan pemerintah, cita-cita pendidikan untuk semua kemungkinan besar hanya merupakan cita-cita yang jauh dari kenyataan” (Maliki, 2008: 130).

Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan dengan pengeluaran uang oleh lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan dan sekolah (Harsono, 2007: 9). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelola pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen keuangan.

Pengelolaan keuangan PKBM, khususnya di PKBM Karya Bhakti Punung hingga saat ini masih memenuhi berbagai permasalahan, antara lain sumber dana yang dimiliki dinilai dari pihak lain belum dikelola secara transparan dan tidak efisien. Selain itu ada beberapa sumber pendapatan tetapi pengelolaan

dan pengalokasiannya kurang tepat sasaran. Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut di atas peneliti melakukan penelitian tentang Pengelolaan Keuangan di PKBM Karya Bhakti Punung.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimanakah karakteristik pengelolaan pembiayaan di PKBM Karya Bhakti Punung”. Fokus penelitian tersebut dibagi menjadi 2 sub fokus:

1. Bagaimana karakteristik sumber–sumber dan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) di PKBM Karya Bhakti Punung?
2. Bagaimana karakteristik realisasi dan pertanggungjawaban keuangan di PKBM Karya Bhakti Punung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik sumber–sumber dan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) di PKBM Karya Bhakti Punung.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik realisasi dan pertanggungjawaban keuangan di PKBM Karya Bhakti Punung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan dibidang manajemen keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PKBM

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi manajemen keuangan sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas PKBM.

### b. Bagi Dinas Pendidikan

Dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen keuangan.

## E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan keuangan: menyusun rencana pendapatan dan belanja (penganggaran), melaksanakan prosedur anggaran, prosedur akuntansi, pembelajaran, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan.
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan.
3. Sumber keuangan adalah sumber dana yang diperoleh PKBM Karya Bhakti Punung, yang berasal dari pemerintah, dan masyarakat.
4. Penggunaan keuangan PKBM adalah pemanfaatan sumber keuangan PKBM berdasarkan pos-pos anggaran yang telah ditentukan.

5. Pertanggungjawaban keuangan PKBM adalah tindakan pertanggungjawaban keuangan PKBM (bendahara) dalam menyusun laporan keuangan sekolah yang meliputi pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan penggunaan atau pembiayaan dana.